DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Malang

Muhammad Averroes Al- Khawarizmi[1*], Marseto[2], Sishadiyati[3]
[1,2,3]Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
*e-mail : maverroes120@gmail.com

Artikel Info

Received :
29 July 2021
Revised :
7 November 2021
Accepted :
21 November 2021

Kata Kunci :
Belanja daerah, DAPER, Kemiskinan, PAD

Keywords :
Regional spending, DAPER, Poverty, PAD

ABSTRAK

Kabupaten malang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur yang selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Jember. Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kuasa merupakan hal yang dapat mempengaruhi bagaimana tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan supaya mengatahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAPER) terhadap Kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui Belanja Daerah (BD) di Kabupaten Malang. Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder, *time series* dengan kurun waktu 11 tahun dari tahun 2009 hingga 2020 dan diolah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda untuk pengujian analisis jalur. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan, dana perimbangan terhadap kemiskinan memiliki dampak negatif signifikan, pendapatan asli melalui belanja daerah terhadap kemiskinan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan, dan dana perimbangan melalui belanja daerah terhadap kemiskinan mempunyai pengaruh negatif signifikan.

The Effect of Regional Original Income and Balancing Funds on Poverty with Regional Expenditures as Intervening Variables in Malang Regency

ABSTRACT

Malang regency has the highest poverty rate in East Java followed by Jember Regency. Regional financial management by the local government as a power holder is something that can affect how the level of poverty and welfare of the people in the area. This study aims to find out how the influence of Regional Native Income (PAD) and Balance Fund (DAPER) on Poverty directly and indirectly through Regional Expenditure (BD) in Malang Regency. The type of data used in this study is secondary data, time series with a period of time from 2009 to 2020 and processed using multiple regression

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

analysis methods for path analysis testing. The results of this study showed that the region's native income has a significant negative influence on poverty, the balance fund has a significant negative impact on poverty, the local native income has a significant negative influence through regional spending on poverty, and the balance fund has a significant negative contribution through regional spending on poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan hanya tentang persoalan jumlah pendapatan masyarakat, namun juga berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk mengelola keuangan yang ada mulai dari penerimaan dan juga belanja yang ada. Menurut (Paat et al., 2019) pembangunan nasional yang memiliki sasaran untuk mengurangi jumlah kemiskinan memerlukan angaran belanja di setiap periodenya dimana anggaran belanja tersebut didapatkan dari sumberdaya dan pendapatan yang dimiliki. Untuk menghadapi kemiskinan Indonesia memiliki cara dengan memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah ialah kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom agar mengurus dan mengatur sendiri persoalan Pemerintah dan keperluan masyarakat daerah pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan pemeriantah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sebagai wujud dari pelaksanaan tugas otonomi daerah dapat kita lihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mudrajad Kuncoro, dalam (Timtim, 2012) pembangunan perekonomian daerah adalah suatu langkah dimana pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat mengolah sumber daya yang ada dan membuat sebuah kolaborasi kerjasama untuk menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru dan menggerakkan perkembangan kegiatan perekonomian pada daerah amat berpegang pada masalah fundamental yang daerah tadi miliki.

Dalam mengatur keuangan daerah sumber penerimaan yang didapatkan pemerintah daerah didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dimana macam-macam pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Macam-macam dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak, dana alokasi khusus, serta dana alokasi umum.

Untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan prinsipnya yang luas, bertanggung jawab, dan nyata pemerintah daerah diharuskan mampu mengatur sumber keuangannya sendiri untuk menjalankan tugasnya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, dan kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti pemerintah daerah harus mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan melakukan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada ataupun melalui pencarian sumber PAD yang baru.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat harus dilaksanakankan oleh Pemerintah Daerah supaya memiliki kemampuan untuk mendanai keperluan daerahnya sendiri, sehingga semakin berkurangnya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat oleh pemerintah daerah dan pada akhirnya bisa menciptakan kemandirian pada daerah (Muhtarom, 2015). Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (Manek & Rudy, 2016) dalam realisasinya, untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah pendapatan asli daerah hanya mampu paling tinggi sebanyak 20%.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

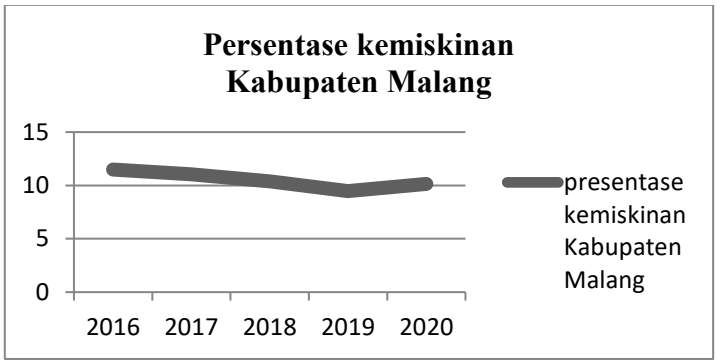
Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Untuk menghadapi permasalahan tadi pemerintah pusat mengalokasikan dana bantuan untuk pemerintah daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan. Dengan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah selanjutnya pemerintah diharapkan mampu mengatur belanjanya agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan daerah tersebut sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Dalam usaha memberikan penambahan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah seharusnya dapat mengatur ukuran belanja yang dianggarkan untuk tujuan hal-hal yang positif, sebagai contoh melaksanakan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk keperluan publik (Setyowati & Suparwati, 2012).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah dalam berita yang diterbitkan oleh Jember Post pada tanggal 24 Februari 2020 menyampaikan bahwa "angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur berada di Kabupaten Malang kemudian Jember menduduki peringkat kedua". Dimana penduduk miskin pada Kabupaten Malang mencapai 268 ribu penduduk.



Sumber : BPS Kabupaten Malang, Diolah, (2021)

Gambar 1. Persentase Kemiskinan Kabupaten Malang

Jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Malang tahun 2016-2020 dapat lihat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dalam bentuk fisik yang berupa buku. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir terhitung dari 2016-2020 mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak tentu setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening di Kabupaten Malang". Tujuan pada penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (DAPER) secara langsung dan secara tidak langsung melalui Belanja Daerah terhadap Kemiskinan (2) Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah Kabupaten Malang guna mengurangi tingkat kemiskinan.

KAJIAN TEORI

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, otonomi daerah ialah kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah sendiri termasuk bagian dari desentralisasi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur masalah pemerintahannya.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah (Prana, 2016)**.** Sumber PAD bersal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, hasil perusahaan milik daerah, hasil retribusi daerah serta hasil pegelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan pajak daerah (Taryono & Ekwarso, 2012)**.**

Dana Perimbangan

Dana perimbangan ialah sumber penerimaan daerah yang diterima dari APBN yang memiliki tujuan mendorong terlaksananya kewenangan pemerintah daerah dalam menggapai tujuan dari adanya penyerahan otonomi untuk pemerintah daerah, terutama kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan yang lebih membaik (Mamuka & Elim, 2014). Perimbangan keuangan dengan dana transfer kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat menjadi intensif untuk pemerintah daerah dengan tujuan mendanai belanja daerah (Sasana, 2011).

Belanja Daerah

Belanja Daerah ialah segala keharusan pemerintah daerah yang dinyatakan sebagai penurun jumlah kekayaan bersih (ekuitas dana) pada periode tahun anggaran yang terkait (Kainde, 2013)**.** Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, belanja daerah menurut pada kelompok belanja terdiri dari belanja tak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tak langsung adalah belanja yang dialokasikan tidak terhubung secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan program. Kelompok belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan terhubung secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan program.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang dialami hampir di seluruh negara sedang berkembang dimana kemiskinan ada akibat dari ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengusahakan hidupnya hingga suatu tingkat yang dibilang manusiawi (Ishak, 2017). Kemiskinan juga berhubungan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan seringkali mereka yang diklasifikasikan miskin (*the poor*) tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), serta kualitas kesehatan dan pendidikan mereka biasanya kurang untuk mencukupi (Dewi et al., 2016).

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kemiskinan

Dengan adanya wewenang yang dimiliki daerah untuk memaksimalkan PAD, akan menghasilkan peningkatan komposisi PAD itu tadi sebagai pendapatan daerah. Meningkatnya PAD yang disebut sebagai modal, secara pengukuran akan lebih banyak mengakibatkan ekstemalisasi yang memberikan sifat positif dan bakal memberikan percepatan pada pertumbuhan ekonomi (Paat et al., 2019). Daerah harus berupaya adar mampu memberikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), baik melalui peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD yang ada ataupun pencarian sumber PAD yang baru sejalan dengan aturan yang ada serta melihat potensi dan kondisi ekonomi masyarakat, karena PAD adalah tolak ukur bagi daerah untuk mewujudkan dan mengusahakan otonomi daerah (Dewi & Paulus, 2017).

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Hubungan Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan

Untuk menghadapi permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kemsikinan pemerintah dipaksa untuk merangkai berbagai langkah yang bisa memberikan peningkatan pada pendapatan masyarakat, mengendalikan masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dalam hal ini penerimaan daerah bisa diguunakan sebagai salah satu instrument untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Penerimaan daerah tadi terdiri dari Pendapatan Alsi Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) (Anwar, 2016).

Berdasarkan pada persoalan yang terdapat pada penelitian ini menurut latar belakang dan landasan teori sehingga didapatkan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh negatif Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang.
2. Diduga terdapat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang.
3. Diduga terdapat pengaruh negatif Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten Malang.
4. Diduga terdapat pengaruh negatif Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kabupaten Malang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan kuantitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang tersusun terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas kaitannya. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui belanja daerah di Kabupaten Malang. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan periode waktu 12 tahun dari tahun 2009 hingga 2020.

Variabel dependen yang digunakan didalam penelitian ini adalah kemiskinan. Variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAPER). Dan variabel intervening yang digunakan yaitu Belanja Daerah (BD). Sumber data pada penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran DJPK Kemenkeu Republik Indonesia untuk variabel PAD, DAPER, dan BD. Sementara untuk variabel Kemiskinan bersumber dair Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang.

Penelitian ini memakai teknik analisis jalur/*path analysis* dengan menggunakan bantuan program SPSS. Analisis jalur adalah pengembangan dari analisis regresi linear berganda (Noor, 2011). Rangkaian pengujian yang digunakan yaitu :

1. Uji Asumsi klasik
   a. Uji multikolinearitas
   b. Uji autokorelasi
   c. Uji heteroskedastisitas
2. Uji Hipotesis
   a. Analisis regresi sederhana
      - Membuat persamaan garis linear sederhana

$$Y + \alpha + bX$$

Keterangan :

Y : subjek dalam variabel dependen yang akan diprediksikan

α : nilai Y ketika nilai X=0

b : angka arah atau koefisien regresi

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

X : subjek pada variabel independen dengan nilai terttentu
- Uji T
- Uji R square

b. Analisis jalur

Persamaan model regresi pada analisis jalur dilakukan dengan dua kali regresi.

Model I $\longrightarrow$ $Z = \beta X + e_1$
Model II $\longrightarrow$ $Y = \beta X + \beta Z + e_1$

Keterangan
Z = belanja daerah
Y = kemiskinan
X = variabel independen
e_1 = Kosntanta
β = koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,107	9,331	Terbebas dari Multikolinearitas
DAPER	0,107	9,331	Terbebas dari Multikoinearitas

Sumber : Data diolah (2021).

Hasil pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance pada variabel PAD dan DAPER sebesar 0,107 dimana hal ini lebih besar dari syarat nilai toleran sebesar 0,1. Sementara untuk nilai VIF dari variabel PAD dan DAPER sebesar 9,331 dimana hal ini juga lebih kecil dari syarat nilai VIF sebesar 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel yang diteliti.

Uji Autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,130	Terbebas dari autokorelasi

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan hasil output uji autokorelasi pada tabel 2 menyatakan bahwa nilai run test sebesar 0,130 dimana hal ini lebih besar dari syarat yang ditentukan yaitu sebesar 0,05. Sehingga pada penelitian ini terbebas dari gejala autokoreasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel PAD memiliki nilai Signifikansi sebesar 0,279 dan variabel DAPER sebesar 0,686. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel melebihi dari nilai syarat signifikasi dengan melebihi nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikasi	Keterangan
PAD	0,279	Terbebas dari Heterokedastisitas
DAPER	0,686	Terbebas dari Heterokedastisitas

Sumber: data diolah (2021)

Uji Hipotesis

Hipotesis pertama

Tabel 4. Uji Hipotesis Pertama

Variabel	R Square	T Hitung	T Tabel	Sig.	Syarat	Kesimpulan
PAD-Kemiskinan	0,398	-2,569	2,228	0,028	<0,05	Diterima

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan R square pada tabel 4 di atas dapat dimaknai bahwa PAD memiliki pengaruh sebesar 39,8% terhadap perubahan kemiskinan dan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar PAD. Hasil hitung variabel PAD terhadap kemiskinan memiliki nilai t hitung melebihi nilai dari pada t tabel dan nilai Signifikan lebih dari syarat sebesar 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa H1 diterima.

Hipotesis kedua

Tabel 5. Uji Hipotesis Kedua

Variabel	R Square	T Hitung	T Tabel	Sig.	Syarat	Kesimpulan
DAPER-Kemiskinan	0,538	-3,411	2,228	0,007	<0,05	Diterima

Sumber: data diolah (2021)

Dilihat dari nilai R Square pada tabel 5 maka bisa disebutkan bahwa DAPER memiliki pengaruh sebanyak 53,8% terhadap perubahan kemiskinan dan sisanya sebanyak 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar DAPER. Hasil hitung variabel DAPER terhadap kemiskinan memiliki nilai t hitung yang melebihi nilai dari pada t tabel dan nilai Sig. lebih dari syarat sebesar 0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Hipotesis Ketiga

Tabel 6. Uji Hipotesis Ketiga

Variabel	Unstandardlized Beta
PAD-BD	4,171
PAD-Kemiskinan	0,111
BD-Kemiskinan	-0,051

Sumber: data diolah (2021)

Untuk melihat seperti apa pengaruh PAD terhadap Kemiskinan secara tidak langsung melalui Belanja Daerah maka perlu dilakukan perkalian antara nilai *unstandardlized beta*

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

PAD-BD dengan nilai *unstandardlized beta* BD-Kemiskinan lalu kemudian hasilnya diperbandingkan dengan nilai *unstandardlized beta* PAD-Kemiskinan. Jika hasil perkalian lebih besar dari nilai PAD-Kemiskinan maka PAD terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 maka 4,171 x (-0,051) = -0,212. hasil ini memiliki arti bahwa nilai diatas lebih besar daripada 0,111 yang artinya PAD terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah berpengaruh secara negatif signifikan. Hal ini berarti bahwa H3 dapat diterima.

Hipotesis Keempat

Tabel 7. Uji Hipotesis Keempat

Variabel	Unstandardlized Beta
DAPER-BD	1,871
DAPER-Kemiskinan	-0,005
BD-Kemiskinan	-0,025

Sumber: data diolah (2021)

Berdasarkan hasil diatas maka 1,871 x (-0,025) = -0,046. Hasil perkalian menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari pada nilai -0,005 yang artinya pengaruh DAPER terhadap kemiskinan melalui Belanja Daerah adalah berpengaruh secara negatif signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat dapat diterima.

PEMBAHASAN

Dari uji yang telah dilaksanakan, didapatkan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sehingga hipotesis pertama yang mengatakan PAD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Malang diterima. Semakin besar pendapatan maka semakin menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah penerimaan pendapatan yang melimpah pemerintah daerah dapat menganggarkan dana tersebut untuk program yang dapat menekan angka kemiskinan seperti belanja pembangunan yang akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Musliadi (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sehingga hipotesis kedua yang mengatakan DAPER berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Malang diterima. Seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan adalah penerimaan yang didapat melalui alokasi dari pemerintah pusat, dimana pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara pemerintah pusat dengan daerah serta membiayai kewenangannya seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilaksanakan Jolianis (2014) yang manghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

PAD dan DAPER berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan melalui belanja daerah. Hasil ini berarti hipotesis ketiga dan keempat bisa diterima. Hal ini sejalan dengan

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

penelitian yang dilaksanakan oleh Dewi & Paulus (2017) yang menyebutkan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui belanja daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tak langsung melalui belanja daerah di Kabupaten Malang pada periode tahun 2009 hingga 2020. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilangsungkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. L. (2016). PENGARUH DAU, DAK, PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN (KOTA MANADO TAHUN 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(2).

Dewi, I., & Paulus, S. (2017). *ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP KEMISKINAN MELALUI BELANJA DAERAH DI KOTA BITUNG*.

Dewi, Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *4*(1), 870–882.

Ishak, J. F. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *17*(1), 55. https://doi.org/10.20961/jab.v17i1.212

Kainde, C. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, *1*(3), 393–400.

Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Data Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Emba*, *2*(1), 646–655.

Manek, M., & Rudy, B. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *18*(1), 19–32.

Muhtarom, A. (2015). Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, *13*(1), 9. https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118

Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. *Kencana Prenada Media Group*, 265.

Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rumate, V. A. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA BITUNG. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.

Prana, R. R. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, 74–86.

Sasana, H. (2011). Analaisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, *18*(1), 46–58.

Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*. *9*.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7618

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Taryono, & Ekwarso, H. (2012). *Analisis Pengeluaran dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009: Vol. 2(5)*.

Timtim, S. (2012). ANALISIS PERAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PEMALANG (ANALISIS TABEL INPUT OUTPUT KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010). *Economic Development Analysis Journal*, *2*.